

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Umum Provinsi Yogyakarta



1. Sejarah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat propinsi yang ada di Indonesia. Propinsi ini beribukota di Yogyakarta. Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau *Ngayogyakarta* (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram tahun 1719-1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti *Yogya yang kerta, Yogya yang makmur*, sedangkan *Ngayogyakarta Hadiningrat* berarti *Yogya yang makmur dan yang paling utama*. Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama (ibu) kota *Sanskrit Ayodhya* dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja(karta) atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa).

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di jaman penjajahan Hindia Belanda disebut *Zelfbesturende Landschappen*. Di jaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.

Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum

dalam *Staatsblad* 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 No. 577.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya adalah :

1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia.
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah)
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu naskah).

Dari 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia, justru dimasa perjuangan bahkan mengalami saat-saat yang sangat mendebarkan, hampir-hampir saja Negara Republik Indonesia tamat riwayatnya. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di Yogyakarta mempunyai kenangan tersendiri tentang wilayah ini.

Apalagi pemuda-pemudanya yang setelah perang selesai, melanjutkan studinya di Universitas Gajah Mada, sebuah Universitas Negeri yang pertama didirikan oleh Presiden Republik Indonesia, sekaligus menjadi monumen hidup untuk memperingati perjuangan Yogyakarta.

Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta.

Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati.

Pasal 18 undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa “ pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa “.

Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18

UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman.

Sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata.

Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada jaman kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman.

Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai kini masih tetap lestari. Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya. Sebutan kata Mataram yang banyak digunakan sekarang ini, tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas kejayaan Kerajaan Mataram.

Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di propinsi ini, di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia.

Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi propinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, bahkan, yang terbaru, wisata malam.

Disamping predikat-predikat di atas, sejarah dan status Yogyakarta merupakan hal menarik untuk disimak. Nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Visi dan Misi Provinsi DIY

a. Visi Povinsi DIY

Pemerintah daerah katalistik dan masyarakat yang mandiri berbasis kekuatan ekonomi local dan sumberdaya manusia yang professional dan beretika.

b. Misi Provinsi DIY

- Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, professional, humanis dan beretika dalam mendukung terwujudnya budaya yang adiluhung.

-Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah berbasis pariwisata yang didukung potensi local dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera.

-Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance.

-Memantapkan prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pelayanan publik

3. Kondisi Fisik Provinsi DIY

a. Batas Administrasi

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah, di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut
- Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara
- Kabupaten Purworejo di sebelah Barat
- Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut



Sumber : Bappeda DIY

Gambar 2.1 Peta Administari DIY

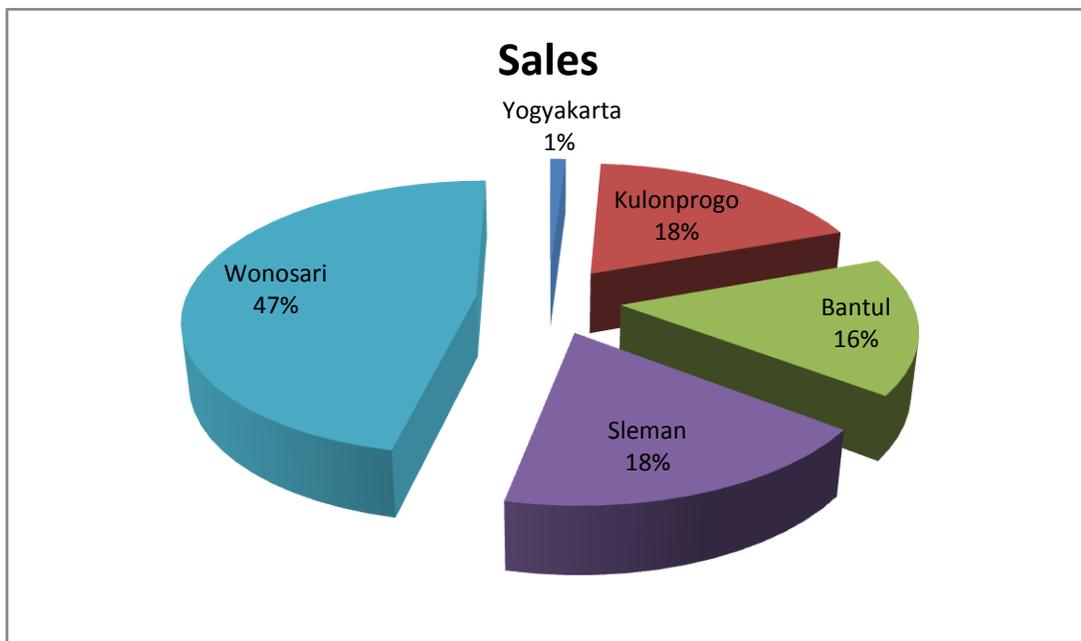
Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian:

1. Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa;
2. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa;
3. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/desa;
4. Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa;
5. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa.

b. Luas Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7°.33'-8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00' - 110°.50' Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²) luas laut 12 mil seluas 2.440,8 km². DIY merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri atas:

Sumber : DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY



Gambar 2.2 Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota

1. Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02%);
2. Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91%);
3. Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40%);
4. Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63%);
5. Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04%).

c. Iklim

Iklim di Yogyakarta termasuk tipe C (Smith dan Ferguson) yaitu rata-rata curah hujan 2.070 milimeter pertahun dengan 99 hari hujan. Suhu rata-rata 26,7° C dan kelembaban rata-rata 83,4 %.

d. Topografi

Berdasarkan bentang alam, wilayah Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi, yaitu satuan fisiografi Gunungapi Merapi, satuan fisiografi Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan satuan fisiografi Dataran Rendah.

e. Pulau dan sungai

Dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup besar di DIY adalah DAS Progo di bagian barat dan DAS Opak-Oya di bagian timur. Sungai-sungai yang cukup terkenal di DIY antara lain adalah Sungai Serang, Sungai Progo, Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Boyong-Code, Sungai Gajah Wong, Sungai Opak, dan Sungai Oya.

4. Kondisi Sosial dan Ekonomi

a. Pemerintahan

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan bekas (Negara) Kesultanan Yogyakarta dan

(Negara) Kadipaten Paku Alaman. Pemerintahan DIY terdiri dari 5 Kabupaten, 78 kecamatan, 169 kota, 264 desa dan 4.508 dukuh.

b. Pendidikan

Berdasarkan hasil SP2010, penduduk Provinsi DI Yogyakarta usia 5 tahun ke atas yang tamat SM/ sederajat sebesar 27,38 persen, tamat DI/DII/DIII sebesar 3,24 persen, tamat DIV/S1 sebesar 5,80 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0,60 persen.

c. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 1.844.275 orang, di mana sejumlah 1.798.207 orang diantaranya bekerja, sedangkan 46.068 orang merupakan pencari kerja. Dari hasil SP 2010, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 68,45 persen, di mana TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan, yaitu masing-masing sebesar 77,63 persen dan 59,69 persen. Sementara itu, bila dibandingkan menurut perbedaan wilayah, TPAK di perkotaan lebih rendah daripada perdesaan, masing-masing sebesar 63,09 persen dan 79,10 persen. Tiga kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Gunung Kidul (80,23), Kabupaten Kulon Progo (73,90), dan Kabupaten Bantul (68,52). Dengan jumlah pencari kerja sejumlah 46 068 orang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 2,50 persen.

d. Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 3.457.491 jiwa, daerah perkotaan sebanyak 2.297.261 jiwa (66,44 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 1.160.230 jiwa (33,56 persen). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 11,24 persen di Kota Yogyakarta hingga yang tertinggi sebesar 31,62 persen di Kabupaten Sleman. Penduduk laki-laki Provinsi DI Yogyakarta sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa. Seks Rasio adalah 98, berarti terdapat 98 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010

NO.	Kabupaten	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Kulonprogo	190.550	198.205	388.755
2.	Bantul	453.981	456.591	910.572
3.	Gunungkidul	326.227	348.181	674.408
4.	Sleman	545.980	544.587	1.090.567
5.	Yogyakarta	188.666	199.442	388.088
Jumlah		1.705.404	1.746.986	3.452.390

Sumber: DIY Dalam Angka 2013, BPS DIY

e. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2012 menurut data BPS sebanyak 565.350 orang atau sebesar 15,88% dari total penduduk DIY. Jumlah penduduk miskin di DIY pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,80% dari tahun 2011 yang banyaknya ada 16,08%. Jumlah penduduk miskin tahun 2012 di wilayah kota/urban sebanyak 305.340 orang atau 13,13%, sedangkan penduduk miskin di wilayah desa/rural sebanyak 259.550 ribu orang atau sebesar 21,76%. Data terbaru per Maret 2013 bahkan menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 15,43%.

f. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB DIY atas harga berlaku tahun 2011 sekitar Rp. 51 Trilyun, terhadap kontribusi nasional hanya sekitar 0,86 % atau berada pada posisi ke-20 nasional (tertinggi Kaltim, DKI, Riau). Empat sektor (4) penyumbang PDRB DIY dari yang besar yaitu Jasa-jasa (20,05%), Perdagangan hotel restoran (19,79%), Industri pengolah (14,36%) dan Pertanian (termasuk didalamnya kehutanan) (14,23%). Sumbangan sektor kehutanan terhadap PDRB DIY mencapai Rp.450 milyar atau 0,87%, akan tetapi tren kontribusi sektor kehutanan terhadap total PDRB prosentasenya mengalami penurunan dalam kurun 6 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2006 : 1,07 – 1,06 – 1,01– 1,01 – 0,94 dan 0,87 pada tahun 2011. Secara keseluruhan (sektor pertanian) trennya juga mengalami penurunan (prosentase terhadap PDRB) walaupun secara nominal mengalami kenaikan.

g. Budaya dan Nilai

Dasar falsafah pembangunan daerah Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) adalah *Hamemayu Hayuning Bawono*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Jogjakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Hamemayu Hayuning Bawono bermakna suatu filosofi kepemimpinan yang selalu mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan mendorong terciptanya sikap serta perilaku hidup individu yang menekankan keselarasan dan keserasian antara sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Illahi dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya. Hakikat budaya adalah hasil cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya Ngayogyakarta Hadiningrat, yang diyakini sebagai salah satu acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara filosofis, budaya jawa, khususnya budaya Ngayogyakarta Hadiningrat dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat ayom, ayem, tata, titi tentrem, karto raharjo. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada masyarakat yang penuh dengan kedamaian, keamanan, keteraturan, dan sejahtera.

B. GAMBARAN UMUM BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Sejarah Singkat BLKPP DIY

Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Provinsi DIY (BLKPP Prov. DIY) berdiri pada tahun 1950 diatas tanah 12.041 m² di Jl. Kyai Mojo No. 5 Yogyakarta. Dalam perkembangannya BLKPP mengalami beberapa perubahan nama yaitu :

- 1) 1950 Awal berdiri bernama Leer Week Central
- 2) 1955 Berganti nama Pusat Latihan Kerja
- 3) 1969 Pusat Latihan Kerja Industri
- 4) 1980 Balai Latihan Kerja Industri
- 5) 1984 Balai Latihan Kerja Tipe A berdasarkan SK Menaker No. 181/MEN/1984 tanggal 26 Juli 1984
- 6) 1997 Balai Latihan Kerja Khusus Pariwisata berdasarkan SK Menaker No. 88/MEN/1997 tanggal 20 Mei 1997
- 7) 2002 Balai Latihan Kerja Provinsi DIY
- 8) 2009 Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Provinsi DIY berdasarkan Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2008

Dalam perkembangannya saat ini BLKPP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta) berstatus sebagai Unit Pelaksana Terpadu Daerah (UPTD) dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Provinsi DIY didirikan berlandaskan Undang-Undang dan Peraturan Gubernur sebagai berikut :

1. UU No.13 Tahun 2003

Pasal 9

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

2. UU no. 13 Tahun 2003

Pasal 10

- Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik didalam maupun diluar hubungan kerja.
- Pelatuihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.

3. Peraturan Gubernur DIY No. 46 Tahun 2008

Bagian keenam

Balai latihan dan Pengembangan Produktivitas

Pasal 35

Balai latihan dan Pengembangan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sebagai pelaksana teknis operasional di bidang pelatihan kerja, manajemen, pengukuran dan pengembangan produktivitas tenaga kerja.

2. Visi dan Misi

BLKPP Provinsi DIY (Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) sebagai Unit Pelaksana Terpadu Daerah (UPTD) memiliki visi, misi, tujuan, sasaran dan fungsi sebagai berikut :

Visi

Terciptanya Tenaga Kerja yang terampil dan kompetitif yang mampu meningkatkan kualitas dan produktifitas untuk memasuki pasar kerja Nasional dan Internasional.

Misi

- 1) Meningkatkan kualitas dan produiktifitas serta kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan diberbagai jenis keterampilan dan keahlian dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia.
- 2) Meningkatkan relevansi dan efesiensi program pelatihan sesuai kebutuhan yang dinamis dan produktif.
- 3) Melakukan tugas pengembangan produktifitas, pengukuran produktifitas, penyuluhan, dan pelatihan manajemen produktifitas.

3. Tujuan

Memberikan keterampilan dan keahlian bagi peserta di berbagai kejuruan untuk mengisi lowongan sesuai kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja secara mandiri dan produktif.

4. Sasaran

Tersedianya tenaga kerja yang trampil dan kompeten sesuai dengan permintaan pasar kerja.

5. Fungsi

Sebagai pelaksana teknis operasional dibidang pelatihan dan pengembangan produktivitas.

6. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas Yogyakarta (BLKPP) terdiri dari Kepala BLKPP, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Kepala Seksi Pengembangan Produktivitas. Struktur Organisasi BLKPP Yogyakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala BLKPP

Kepala BLKPP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun program pembinaan dan pengawasan operasional kegiatan Balai berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya berdasarkan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan.

2. Membagi tugas atau kegiatan kepada para Kepala Seksi/Sub Bagian dan pejabat fungsional di lingkungan Balai Latihan Kerja dengan member arahan baik secara tertulis maupun lisan.
3. Memberi petunjuk kepada para Kepala Seksi/Sub Bagian dan Pejabat Fungsional di lingkungan Balai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat efektifitas pelaksanaan tugas.
4. Memeriksa hasil kerja para Kepala Seksi/Sub Bagian dan Pejabat Fungsional di lingkungan Balai Latihan Kerja.
5. Memantau dan mengevaluasi kegiatan Balai untuk mengetahui permasalahan yang ada guna menetapkan upaya pemecahannya.
6. Melakukan Pembinaan Staf agar tercipta aparatur yang berdaya guna dan berhasil guna.
7. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Instansi/Lembaga terkait.
8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas yang berkaitan dengan tugas Balai Latihan Kerja baik diminta maupun tidak.

9. .Memberikan ceramah atau konsultasi tentang latihan kerja dan pengembangan produktivitas pada kegiatan kursus sesuai dengan informasi yang dibutuhkan.
10. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kendala yang dihadapi kepada atasan yang bawahi secara tertulis maupun lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan.
11. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kendala yang dihadapi kepada atasan yang bawahi secara tertulis maupun lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional BLKPP Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan kewenangannya.
2. Menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam satu paket untuk tingkat menengah.
3. Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat menengah.

4. Membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya.
5. Membuat media atau alat peraga pelatihan agar mempermudah pemahaman pelatihan kerja.
6. Mengajar dan melatih pada pelatihan tingkat dasar dan menengah.
7. Mengevaluasi kemajuan peserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya.
8. Mempersiapkan bahan dan peralatan uji kompetensi kerja untuk bahan yang masih memerlukan proses.
9. Menyusun program pelatihan tingkat dasar bagi pencari kerja.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kendala yang dihadapi kepada atasan yang berwenang secara tertulis maupun lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan.

c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha BLKPP Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan lingkup Subbagian Tata Usaha berdasarkan visi, misi dan serta rencana dan program kerja Balai sebagai acuan dan pedoman bagi bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas Subbagian.
2. Membagi tugas dan mengatur serta mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar sasaran dan tujuan dapat tercapai sesuai rencana dan program kerja BLKPP.
3. Melakukan koordinasi dengan Seksi Latihan Kerja dan Seksi Pengembangan Produktivitas agar terjalin sinkronisasi dan hubungan kerja yang harmonis.
4. Melakukan bimbingan dan menilai disiplin, tanggung jawab, dedikasi dan loyalitas bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan.
5. Melakukan peringatan dan teguran kepada bawahanyang melakukan pelanggaran disiplin pegawai sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. Mengawasi, mengevaluasi dan mengedalikan bawahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya (baik yang sudah, sedang dan yang belum dilaksanakan) agar terarah sesuai rencana dan program kerja BLKPP.

7. Menyiapkan konsep penyusunan renstra, rencana program kerja Balai Latihan Kerja, laporan untuk diajukan kepada atasan.
8. Membaca dan mempelajari surat-surat masuk dan menyampaikan kepada atasan untuk mendapatkan disposisi/arahan penyelesaian.
9. Mendistribusikan surat-surat yang telah didisposisi atasan kepadabawahan serta memantau proses penyelesaiannya.
10. Melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas BLKPP.
11. Menyiapkan konsep rencana anggaran, laporan keuangan dan konsep lain urusan administrasi keuangan untuk diajukan kepada atasan.
12. Melakukan layanan kehumasan, kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban lingkungan kantor.
13. Mempelajari dan mengkaji kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugas pada Subbagian serta menyiapkan saran- saran pemecahan kepada atasan.

14. Melaporkan pelaksanaan tugas dan kendala yang dihadapi kepada atasan yang berwenang secara tertulis maupun lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan.

d. Kepala Seksi Pelatihan Kerja

Kepala Seksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun langkah kegiatan Seksi Pelatihan Kerja berdasarkan rencana kegiatan sebagai pedoman kerja.
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pelatihan Kerja sesuai bidangnya.
- 3) Memberikan petunjuk, pembinaan kepada bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelatihan Kerja berdasarkan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai pembinaan bawahan.
- 5) Menyusun bahan rencana penyelenggaraan latihan di Balai sesuai dengan DIPA, DPA SKPD dan petunjuk operasional sebagai bahan masukan atasan.
- 6) Menyusun jadwal kegiatan latihan berdasarkan data Instruktur dan materi pelajaran yang diberikan.

- 7) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing.
- 8) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk penyempurnakan lebih lanjut.
- 9) Menyiapkan bahan koordinasi/hubungan kerja sama dengan Instansi/Lembaga terkait.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- 11) Membuat Laporan bulanan, Triwulan dan tahunan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Balai sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas dan kendala yang dihadapi kepada atasan yang berwenang secara tertulis maupun lisan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan pimpinan.

d. Kepala Seksi Pengembangan Produktivitas

Kepala Seksi Pengembangan Produktivitas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyusun langkah kegiatan Seksi Pengembangan Produktivitas berdasarkan rencana kegiatan sebagai pedoman kerja.

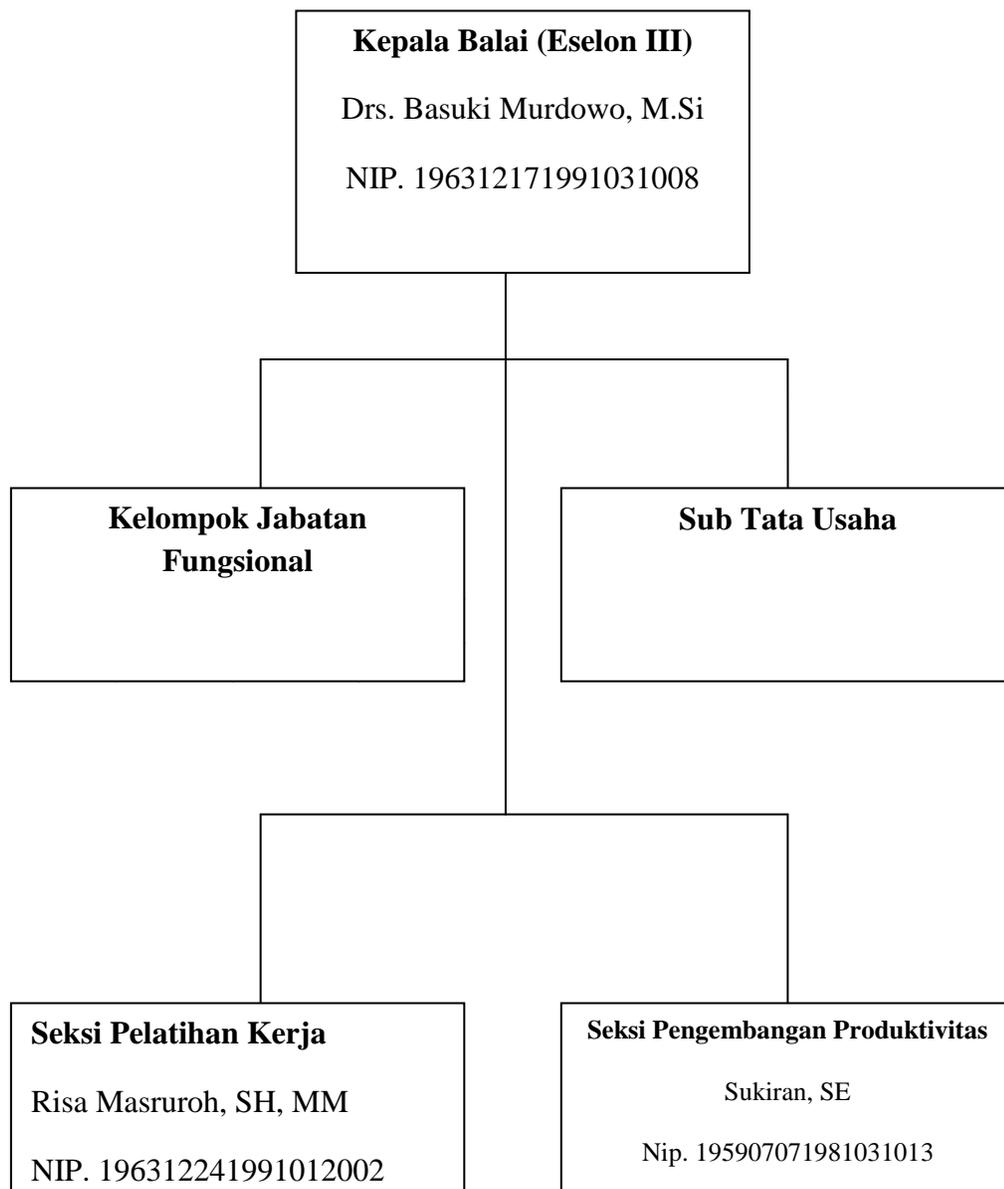
- 2) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Produktivitas sesuai bidangnya.
- 3) Memberikan petunjuk, pembinaan kepada bawahan agar melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Produktivitas berdasarkan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai pembinaan bawahan.
- 5) Menyusun bahan rencana penyelenggaraan latihan di Balai sesuai dengan DIPA, DPA SKPD dan petunjuk operasional sebagai bahan masukan atasan.
- 6) Menyusun jadwal kegiatan latihan berdasarkan data Instruktur dan materi pelajaran yang diberikan.
- 7) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing.
- 8) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk penyempurnakan lebih lanjut.
- 9) Menyiapkan bahan koordinasi/hubungan kerja sama dengan Instansi/Lembaga terkait.

- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- 11) Membuat Laporan bulanan, triwulan dan tahunan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Balai sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.

Bagan Struktur Organisasi BLKPP
(PERGUB Nomor 36 tahun 2008)

Gambar 2.3 Bagan Struktur Organisasi BLKPP



7. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Tabel 1.2
Dukungan/ Kekuatan Pegawai BLKPP PROVINSI DIY

NO	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN	
			PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Pejabat Struktural	4 orang	S-1	4
2.	Pejabat Fungsional	59 orang	S-2	3
			S-1	42
			D-3	4
			D-2	3
			STM	2
			SPIKN	1
			SKKA	1
			SMIK	3
3.	Fungsional Umum	46 orang	S-1	12
			SMEA	9
			KPAA	6
			SMKK	1
			STM	2
			D-3	1
			SMP	4

			KPA	1
			SD	2
4.	Bagian Tata Usaha	20 orang	S-1	5
			SMEA	4
			KPAA	2
			SMKK	1
			STM	1
			D-3	1
			SMP	3
			KPA	1
			SD	2
5.	Seksi Pelatihan	13 orang	S-1	4
			SMEA	3
			KPAA	3
			SMA	1
			STM	1
			SMP	1
6.	Seksi Pelatihan Produktivitas	12 orang	S-1	2
			SMA	7
			SMEA	2
			KPAA	1

